

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afiah, R.N, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Conville, Mc and Wing, *Research Methods of Law*, Edinburgh University Press, H. C. (Eds.), Edinburgh.
- Ginting, E.R, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Harahap, M.Y, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Ibrahim, Jhony, 2006, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang.
- Mersky, R., M., Dunn, D., J., 2002, *Legal Research Illustrated*, Foundation Press, New York.
- Meyliana, Devi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang.
- Murakami, Masahiro, 2003, *The Japanese Antimonopoly Act*, tanpa penerbit, Jepang, hlm. 67-68.
- Nadapdap, Binoto, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prayoga, A.D, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek ELIPS. Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan, Jakarta.
- Siswanto, Arie, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makaro, 2010, *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sumadi, Putu Sudarma, 2017, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*, Zifatama Jawara, Sidoarjo.

Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54, 1947) Japan.

Competition Act Chapter 50B Republic of Singapore.

Federal Economic Competition Law.

German Act Against Restraints of Competiton (German Competition Act – GWB)

Keputusan Kammergericht Berlin tertanggal 15 Mei 1984.

Competition Act No. 89 of 1998 South Africa

Promotion of Access to Information Act No. 2 of 2000 South Africa.

Tugas Akhir

Kulevska, Sophie, *Corporate Human Rights Protection in Light of Effective Competition Law Enforcement*, Tesis, Program Master Fakultas Hukum Lund University, Lund.

Andersson, Helena, 2017, *Dawn raid Under Challenge: A Study of the European Comission's Dawn raid Practices in Competition Cases From a Fundamental Rights Perspective*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Stockholm University, Stockholm.

Jurnal

Biereder, Magdalena, *Dawn Raids – the Powers of Investigation of the European Commission according to Art 20-22 of the Council Regulation No. 1/2003*, *Juridicum Law Review*, Vol 1:1.

Basarah, Ahmad, 2014, *Kajian Teoretis Terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43, No. 1.

Islam, Imran & Michael Ramsden, *EC Dawn Raids: A Human Rights Violence*, The Competition Law Review, Volume 5 Issue 1 pp 61-87.

Maarif, Syamsul, 2002, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 19.

Ryan, Bobbie, *A CRITICAL ANALYSIS OF THE INVESTIGATIVE AND PROCEDURAL POWERS OF THE EUROPEAN COMMISSION IN IMPLEMENTING COMPETITION LAW*, Plymouth Law and Criminal Justice Review, No. 1.

Simbolon, Alum, 2012, *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3.

Sukarmi, 2012, *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 7.

Makalah/Pidato

Rauf, Muhammad Syarkawi, 2016, "Key Lessons in Investigating Abuse of Dominance Cases", *Makalah*, disampaikan dalam OECD/KPC Workshop ON ABUSE OF DOMINANCE AND UNILATERAL CONDUCTS: FUNDAMENTALS, Bali, 11-13 May 2016.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, 20 September 2017.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2016.

Internet

Akhir, Dani Jumadil, "Kewenangan KPPU harus diperkuat seperti KPK", <https://economy.okezone.com/read/2018/07/03/320/1917472/kewenangan-kppu-harus-diperkuat-seperti-kpk>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.

Ariefana, Pebriansyah, "Jokowi: Orientasi Kerja Pemerintahan Harus Pada Hasil", <https://www.suara.com/news/2019/08/16/115919/jokowi-orientasi-kerja-pemerintahan-harus-pada-hasil>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.

- Ayu, “Kedua Ahli dari Kepolisian Tidak Kompak”, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/ke-dua-ahli-dari-kepolisian-tidak-kompak/>, diakses pada tanggal 1 November 2019.
- Bush, Nathan, “Threat of antitrust "Dawn raid" in Indonesia”, <https://www.dlapiper.com/it/italy/insights/publications/2017/08/threat-of-antitrust-dawn-raids-in-indonesia/>, diakses pada 14 April 2019.
- Deny, Septian “Revisi UU, KPPU Ingin Segera Jadi Lembaga Negara”, <https://www.merdeka.com/uang/revisi-uu-kppu-ingin-segera-jadi-lembaga-negara.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.
- Firman, Muhammad, “Terbukti Kartel Skutik, KPPU Denda Yamaha dan Honda Rp 47,5 Miliar”, <https://katadata.co.id/berita/2017/02/20/terbukti-kartel-skutik-kppu-denda-yamaha-dan-honda-rp-475-miliar>, diakses pada tanggal 1 September 2019.
- Fnh, “Kewenangan Geledah dan Sita Tak Masuk Revisi UU Persaingan Usaha”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592e8f618f511/kewenangan-geledah-dan-sita-tak-masuk-revisi-uu-persaingan-usaha/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses pada tanggal 1 September 2019.
- Kurniawan, S.S, “Wasit persaingan usaha bakal lebih bertaji“, <https://nasional.kontan.co.id/news/wasit-persaingan-usaha-bakal-lebih-bertaji>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.
- Pieters, Danny “Functions of Comparative Law and Practical Methodology of Comparing”, www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/Functions%20of%20comparative%20law%20and%20practical%20methodology%20of%20comparing.pdf, diakses pada tanggal 11 Januari 2020.
- Putra, Nanda Narendra, “Menutup Kisah KPPU yang Ditinggal Pergi Para Pegawai“, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59911ac296e92/menutup-kisah-kppu-yang-ditinggal-pergi-para-pegawai/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.
- Rahmi, Novrieza, “Status Kelembagaan Masih Menjadi Agenda Utama Komisioner Baru KPPU“, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aec4589128ed/status-kelembagaan-masih-menjadi-agenda-utama-komisioner-baru-kppu/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019.

Redaksi Gapuspindo, “Penambahan Kewenangan KPPU Masih Jadi Ganjalan”, <http://gapuspindo.org/2016/12/02/penambahan-kewenangan-kppu-masih-jadi-ganjalan/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019.

Sari, Deliana Praditha, “REVISI UU PERSAINGAN USAHA: KPPU Bakal Kantongi Izin Penggeledahan dan Penyitaan”, <https://kalimantan.bisnis.com/read/20161012/439/591711/revisi-uu-persaingan-usaha-kppu-bakal-kantongi-izin-penggeledahan-dan-penyitaan>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.

Simorangkir, Eduardo, “Yamaha Pertanyakan KPPU Ambil Dokumen Tanpa Surat Pemberitahuan”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3391223/yamaha-pertanyakan-kppu-ambil-dokumen-tanpa-surat-pemberitahuan>, diakses pada tanggal 1 September 2019.

Szymanski, Ivan dan Fernando Ruiz, 2018, “Quick Guide for Antitrust Dawn raid in Mexico”, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d936228a-1889-443f-b0ff-39c4cb1e0066>, diakses tanggal 22 Agustus 2019.

Thomas, Vincent Fabian, “KPPU Keluhkan Keterbatasan Wewenang Bikin Penanganan Kasus Lambat”, <https://tirto.id/kppu-keluhkan-keterbatasan-wewenang-bikin-penanganan-kasus-lambat-ecbR>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019.

White & Case, “Competition Dawn Raid”, <https://www.whitecase.com/law/practices/compliance/dawn-raid>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.